

ADA KEBIJAKAN BOLEH MUDIK

Pengelola Kuliner Tatap Liburan Idul Fitri

BANTUL (KR) - Kebijakan pemerintah boleh mudik merayakan Hari Raya Idul Fitri disambut antusias pengelola rumah makan di kawasan Pantai Depok Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Mereka berharap kunjungan wisatawan meningkat sehingga bisa memberikan masukan lebih bagi masyarakat. Meski begitu pihaknya akan melaksanakan secara ketat penerapan protokol kesehatan (Prokes) sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ketua Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok Parangtritis Kretek Bantul, Sutarlan, Selasa (23/3), mengungkapkan kebijakan dari pemerintah tersebut sudah diantisipasi para pelaku

usaha kuliner Pantai Depok. Liburan tersebut tentu banyak wisatawan masuk Pantai Depok.

Situasi tersebut sudah pasti jadi peluang bagi pengelola rumah makan untuk menjajakan kuliner. "Liburan tahun lalu benar-benar sangat sulit. Oleh karena itu kami berharap liburan Idul Fitri tahun ini bisa memberikan berkah bagi masyarakat," ujar Sutarlan.

Sementara tokoh masyarakat Pantai Depok sekaligus pengelola Rumah Makan Salsabila, Dardi Nugroho, optimis liburan Idul

Fitri tahun ini jauh lebih baik seimbang sebelumnya. Oleh karena itu Dardi mengajak semua pengelola rumah makan di kawasan Pantai Depok memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan.

"Sebelumnya kami sudah libur cukup lama mengingat pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Tapi kami bersyukur di tengah kondisi sulit seperti ini kuliner Pantai Depok masih menjadi favorit wisatawan untuk mengisi liburan. Semua rumah makan di sini harus menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.

Dijelaskan, keunggulan kuliner Pantai Depok menyediakan ikan segar dengan harga terjangkau.



Wisatawan menyantap menu ikan di Pantai Depok.

KR-Sukro Riyadi

(Roy)-f

DORONG PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT Program Padat Karya Berlanjut



KR-Judiman

Wabup Joko Purnomo mensosialisasikan program Padat Karya di Mangunan Sewon.

BANTUL (KR) - Program Padat Karya yang sudah berjalan di Bantul akan terus berlanjut, karena program ini selain mendukung pembangunan di tingkat pedusunan, utamanya pembangunan infrastruktur juga sangat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal ini dikemukakan Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo didampingi Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Istiril Widilastuti, saat melakukan sosialisasi program Padat Karya di Pedukuhan Mangunan Panggunharjo Sewon Bantul, Selasa (23/3).

Menurut Joko Purnomo, dengan terealisasinya program Padat Karya, warga di pedukuhan yang mendapatkan proyek ini bisa bekerja sebagai tukang batu atau tenaga kerja, sehingga sementara bisa mengurangi pengangguran. "Ya lumayan to, warga yang tidak bekerja selama pandemi karena dirumahkan bisa mendapatkan upah untuk uang jajan anaknya," ungkap

nya. Karena itu atas nama Pemkab Bantul, Joko Purnomo berterima kasih kepada Gubernur DIY lewat aspirasinya wakil rakyat di DPRD DIY maupun DPRD Bantul, sehingga program Padat Karya di Bantul bisa berjalan lancar.

Sementara Istiril menambahkan, jumlah proyek Padat Karya di Bantul tahun 2021 ada 163 titik yang terdiri dari DIY 60 titik dan Bantul 103 titik. Dana yang dari DIY per titik Rp 160 juta, sedangkan yang dari Bantul per titik Rp 100 juta.

"Untuk Padat Karya yang dananya dari Pemda DIY dikerjakan selesai 18 hari, sedangkan yang dari Bantul harus selesai dalam waktu 21 hari," jelasnya.

Jenis pekerjaan yang diajukan paling banyak berupa pembuatan jalan dusun dan sarana kelancaran irigasi. "Untuk saat ini masih proses lelang pengadaan material, sehingga belum bisa mulai kerja," jelas Istiril. (Jdm)-f

KPP Pratama Buka Layanan Pojok Pajak



KR-Sukro Riyadi

Kakanwil Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) DIY, Yoyok Satiotomo meninjau layanan Pojok Pajak di Kapanewon Sedayu.

BANTUL (KR) - ngatakan KPP sebagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul membuka layanan Pojok Pajak di Kapanewon Sedayu. Program tersebut dibuka dalam upaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Kakanwil Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) DIY, Yoyok Satiotomo, Selasa (23/3), me-

Horapannya bisa men-

dorong masyarakat di Bantul untuk melakukan kewajiban perpajakannya. "Lokasinya cukup strategis sehingga warga yang sekiranya dekat dengan Kapanewon Sedayu bisa melakukan pembayaran di sini. Jadi tidak perlu lagi ke Kota Bantul," ujarnya.

Pojok layanan ini sangat penting, KPP Pratama wajib memiliki unit-unit pelayanan di setiap wilayah. Selain untuk melaporkan SPT, layanan pojok pajak juga bisa digunakan untuk konsultasi terkait pajak. Selain di Sedayu, sebelumnya sudah dibuat pelayanan di Kapanewon Kretek, Piyungan serta Banguntapan.

Direktorat Jenderal Pajak menyediakan berbagai fasilitas bagi wajib pajak di antaranya lewat eBilling untuk membuat kode billing dan eFiling serta eForm untuk melaporkan SPT tahunan. (Roy)-f

TARGET JADI KABUPATEN LAYAK ANAK 2025 Bupati Akan Bentuk Satgas Anak

BANTUL (KR) - Bupati Bantul berencana segera membentuk satgas dan gugus tugas anak dan perempuan dalam rangka percepatan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam penerapannya, dana padukuhan sebesar Rp 50 juta dapat diperuntukkan bagi kebutuhan dalam rangka mendukung percepatan KLA.

"Dana padukuhan Rp 50 juta salah satunya dapat dialokasikan pada Posyandu dan PAUD. Kebutuhan bagi anak ini mendukung percepatan KLA," tegas Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, saat menerima kunjungan dari Forum Anak Bantul (Fonaba) dan Dinsos Bantul, Selasa (23/3).

Menurut Bupati, KLA dapat tercapai apabila kabupaten dapat memberikan hak hak anak. Beberapa hak anak yang paling penting dan

krusial yakni anak bisa hidup wajar normal tanpa ada kekerasan.

"Maka butuh satgas dan gugus tugas layak anak di lapangan untuk tindakan antisipasi pencegahan kasus kekerasan, perundungan dan pembuluan pada anak. Rencananya kami akan membuat satgas dan gugus tugas layak anak sampai level kelurahan. Yang jelas saat ini Bantul sudah pada level Madya, kami berharap naik 3 lagi yakni menuju ke Nindya, Utama kemudian lanjut ke KLA" urainya.

Kasi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Dinsos Bantul, Sugondo SKM, menegaskan Kabupaten Bantul ditargetkan dapat menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025. Adapun sebuah daerah berhasil menjadi KLA jika kabupaten tersebut terbebas dari diskriminasi dan kekerasan pada anak.

Ia menegaskan untuk mencapai KLA dibutuhkan satu kelembagaan dan 5 kluster. Lima kluster tersebut adalah kluster hak sipil dan kebebasan, kluster pengasuhan alternatif dan lingkungan keluarga, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan serta kluster perlindungan khusus.

Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul, Zainul Zain, menegaskan prinsip KLA bagaimana pemerintah secara terpadu dan holistik memperhatikan hak anak mulai perencanaan pembangunan, penganggaran hingga pelaksanaan dimana suara anak, aspirasi mereka didengar. Selain itu ada kepedulian dan mempertimbangkan hak-hak anak saat mengambil kebijakan. (Aje)-f

Pemerintah Dukung Industri Perfilman dan Kampanye Menonton di Bioskop dengan Aman

JAKARTA (KR) - Upaya untuk memulihkan ekonomi nasional terus dilakukan Pemerintah. Setelah beberapa waktu lalu menerima audiensi dari para pelaku industri kreatif, khususnya animasi dan komik, Jumat (19/3) lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Perindustrian, menerima audiensi dari para insan perfilman di Loka Kretagama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Bapak Presiden secara langsung telah memberi arahan kepada saya, khusus untuk industri perfilman, pekerja film dan pekerja budaya. Maka dari itu kehadiran ini sangat penting. Saya juga sudah menerima usulan-usulan yang telah disampaikan teman-teman kepada Bapak Presiden," kata Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, para insan perfilman yang hadir menyampaikan bahwa 90% pemasukan industri perfilman berasal dari bioskop yang merupakan hilir dari industri ini. Mereka menerangkan bahwa pemutar film melalui digital platform atau streaming belum bisa memenuhi kebutuhan produksi film.

Ramainya bioskop memiliki efek sampai ke pekerja film sehingga kampanye



Airlangga Hartarto saat menerima insan film.

KR-Istimewa

menonton film di bioskop perlu digaungkan. Selain itu, mereka pun menyampaikan usulan stimulus pengalokasian dana pemulihan ekonomi nasional demi mendukung industri perfilman Indonesia.

"Saya telah membaca usulan-usulan yang disampaikan terkait alokasi dana pemulihan ekonomi nasional untuk sektor perfilman. Dari audiensi ini saya berharap bisa mendapatkan data-data yang konkret dan akuntabel sehingga bisa mendukung Pemerintah dalam mengambil keputusan, khususnya kebijakan mendukung pemulihan di sektor perfilman,"

tambah Menko Airlangga. Perwakilan tersebut menyampaikan bahwa pada tahun 2016, terdapat 2.418 jumlah usaha yang bergerak di sub-sektor film, animasi dan video, dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019 diproyeksikan lebih dari 50.000 orang.

Dalam kesempatan kali ini perwakilan dari perfilman menyampaikan bahwa sejak industri film diangkat dari Daftar Negatif Investasi (DNI) di tahun 2016, industri film Indonesia mengalami peningkatan 20% dari segi investasi. Pada akhirnya industri film tanah air mampu tumbuh dan masuk dalam 10 industri film terbesar di dunia. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah industri perfilman Indonesia. Mereka mengharapkan pencapaian ini tidak hanya menjadi kenangan.

Selanjutnya, Menko Airlangga menanggapi bahwa bioskop sudah dapat dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi antusiasme masyarakat untuk kembali menonton di bioskop memang belum pulih seperti dulu.

"Pemerintah pasti mendukung penuh upaya kam-

panye nonton di bioskop yang aman, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya berharap bioskop-bioskop bisa lebih gencar lagi menggaungkan bahwa nonton di bioskop akan tetap aman dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau stigma itu bisa sampai ke publik, mereka akan kembali berani nonton di bioskop. Penuhi persyaratan itu, nanti akan kita dorong," pungkasnya.

Menutup audiensi kali ini, para insan perfilman yang hadir sepakat untuk membuat lebih rinci lagi terkait ide-ide yang didukung oleh riset-riset sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah.

Audiensi kali ini dihadiri oleh Triawan Munaf, Mira Lesmana, Dian Sastro, Wicky Olinde, Joko Anwar, Dewinta Hutagaol, Sunil Samtani, Chand Parwez dan Angga Dwimas Sasongko. Juga beberapa asosiasi yang terkait dengan industri perfilman yang hadir secara daring (online). Mereka semua mewakili stakeholder dalam industri perfilman. (*)-f



Wakil dari insan film saat menyampaikan pandangan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

KR-Istimewa